

KERANGKA PEMANTAPAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN

Asriani

STIA AL Gazali Barru
asriani@algazali.ac.id

ABSTRAK

Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik perlu terus diarahkan dalam mewujudkan pemerataan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan (inclusiveness). Melalui forum perencanaan pembangunan, masyarakat berkesempatan untuk bertemu dan berdiskusi sehingga bisa mengurangi potensi konflik di antara masyarakat. Stabilitas sosial dapat juga dilakukan dengan menjalankan mitigasi bencana yang tepat dan komprehensif, sehingga potensi ketidakstabilan sosial akibat bencana dapat dikurangi. Seperti telah diketahui bersama, Indonesia merupakan daerah rawan bencana dengan rata-rata kejadian bencana mencapai 1.100 kejadian setiap tahunnya berupa bencana geologi (gempa bumi, letusan gunung api, longsor) maupun bencana hidrometeorologi (banjir, angin puting beliung, cuaca ekstrim, abrasi, tsunami). Pada era demokrasi, stabilitas politik dapat dibangun dengan penguatan kapasitas lembaga politik dan masyarakat sipil. Lembaga politik seperti partai politik harus melakukan fungsi-fungsi politiknya secara baik, dan masyarakat sipil harus mampu menuntut hak-hak mereka atas kesejahteraan dan keadilan. Amartya Sen menyebutkan bahwa pada sebuah demokrasi, para pejabat yang dipilih hanya bekerja baik untuk masyarakat apabila kepentingan mereka menjadi taruhannya. Oleh karena itu, demokrasi memerlukan masyarakat yang kuat agar

ada jaminan bahwa kontrol masyarakat berjalan baik, mekanisme pergantian kekuasaan terjaga, dan pemimpin memelihara amanahnya.

Kata kunci : Pembangunan, kesejahteraan, berkeadilan, peningkatan

A. PENDAHULUAN

Salah satu kunci untuk memantapkan perekonomian nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan adalah memastikan agar perekonomian nasional dapat tumbuh secara berkelanjutan. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi nasional ini tentunya perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, yang tidak hanya tinggi tetapi

juga perlu berkualitas.

Pertumbuhan ekonomi perlu ditopang oleh pertumbuhan dari sisi permintaan dan sisi penawaran yang seimbang, agar peningkatan jumlah permintaan tidak diikuti oleh tekanan inflasi yang tinggi.

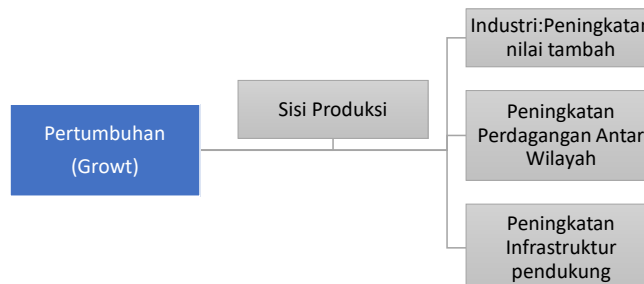
Sementara itu, tumbuhnya sisi penawaran menjadi sangat penting bagi pemantapan ekonomi nasional, jika ditopang oleh pertumbuhan sektor-sektor produktif yang dapat mendorong perluasan kesempatan kerja dan pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Adapun kerangka pemantapan perekonomian nasional dituangkan dalam Gambar 1 dan 2

Gambar 1 Kerangka pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran



Gambar 2 : Kerangka pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi



Sisi Pengeluaran

Dalam rangka pemantapan perekonomian nasional dari sisi pengeluaran, aspek pertama yang perlu didorong adalah meningkatkan daya beli masyarakat, dimana kekuatan permintaan domestik ternyata sangat penting terutama saat kondisi ekonomi global yang tidak kondusif.

Di tahun 2015 dan 2016, di saat ekspor tidak dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia karena kondisi eksternal yang sedang lesu, konsumsi masyarakat menjadi faktor penting yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terjaga pada tingkat yang cukup tinggi. *Aspek pertama* yang diperlukan untuk memantapkan perekonomian nasional adalah peningkatan iklim investasi yang perlu terus ditingkatkan agar tetap menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi di sisi pengeluaran. Peningkatan kegiatan investasi, baik dalam bentuk akumulasi kapital domestik maupun asing, akan menjadi faktor pengungkit ekonomi yang sangat dibutuhkan; terutama karena pertumbuhan investasi akan memberikan efek ganda terhadap perekonomian dalam perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan akhirnya dapat membantu dalam penanggulangan kemiskinan.

Di lain pihak, peningkatan investasi diharapkan akan berperan sebagai medium transfer teknologi yang akan berkontribusi terhadap meningkatnya produktivitas, yang kemudian akan meningkatkan daya saing ekonomi suatu bangsa.

Aspek kedua adalah mendorong belanja yang lebih berkualitas ditingkat pusat dan daerah, melalui kebijakan alokasi anggaran yang mencerminkan upaya peningkatan efisiensi namun masih memberikan ruang fleksibilitas bagi pemerintah atau pemerintah

daerah untuk merespon dinamika internal maupun eksternal.

Kriteria belanja yang berkualitas adalah memenuhi tiga unsur efisiensi, yaitu: (i) efisiensi alokasi, (ii) efisiensi teknis dan (iii) efisiensi ekonomi. *Efisiensi alokasi* menekankan pada perlunya alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan riilnya serta diarahkan untuk kegiatan produktif yang mampu memberikan nilai tambah dan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Dalam hal ini kata kuncinya adalah akurasi menentukan besaran alokasi dan akurasi alokasi pada sektor-sektor yang mempunyai efek multiplier yang kuat bagi perekonomian. Jadi esensi dari efisiensi alokasi adalah tepat jumlah dan tepat alokasi. *Efisiensi teknis* lebih

menekankan pada proses pelaksanaan anggaran yang dapat direalisasikan sesuai dengan rencana dan dapat menghasilkan *output* atau *outcome* yang berkualitas.

Sedangkan *efisiensi ekonomi* lebih menekankan pada pentingnya menjaga *output* dan *outcome* yang dihasilkan sesuai dengan besaran anggaran yang dikeluarkan, serta menjamin bahwa besaran anggaran yang dikeluarkan akan memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Dengan demikian, esensi dari efisiensi ekonomi adalah mampu menciptakan efek pengganda yang optimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Sumber: *Keynote Speech Menteri Keuangan RI, 2012*). Aspek ketiga adalah daya saing ekspor yang perlu ditingkatkan agar barang ekspor Indonesia dapat bersaing di pasar internasional, sehingga volume ekspor Indonesia dapat meningkat lebih tinggi. Daya saing ekspor dapat didorong dan ditingkatkan melalui peningkatan efisiensi produksi, inovasi dan penciptaan sistem logistik yang lebih efisien. Sementara itu, untuk mengurangi kerentanan ekspor Indonesia terhadap pasar ekspor tertentu, pemanfaatan peluang pasar ekspor, terutama di pasar-pasar ekspor

baru, akan menjadi sangat penting. Faktor lain yang menjadi penentu daya saing ekspor adalah kemudahan dalam proses ekspor dan impor, baik secara prosedur maupun transparansi biaya; serta peningkatan mutu dan standar produk ekspor.

Sisi Produksi

Dari sisi produksi, *aspek pertama* untuk mendorong pematapan ekonomi nasional adalah meningkatkan nilai tambah di sepanjang rantai nilai industri. Pembangunan industri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi, karena sektor industri diharapkan menjadi sektor utama yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di sisi produksi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder pada penelitian ini yang berkaitan dengan pendekatan tentang “Kerangka Pemantapan Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan” pada penelitian ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam buku (*in books*).

C. PEMBAHASAN

Peningkatan nilai tambah dalam rantai nilai industri sangat penting untuk mendorong daya saing industri, sehingga industri dapat berkembang dan memberikan dampak yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. *Aspek kedua* dari sisi produksi yang penting adalah peningkatan perdagangan antar wilayah. Sektor perdagangan merupakan salah satu komponen utama pendorong ekonomi dari sisi produksi. Namun demikian, hal yang penting untuk diperhatikan ke depan adalah bagaimana mengurangi ketimpangan perdagangan antar wilayah Indonesia, karena saat ini sebagian besar perdagangan masih terpusat di pulau Jawa. Perdagangan antar wilayah yang lebih seimbang akan mendorong aktivitas ekonomi yang lebih merata di wilayah Indonesia, sehingga dapat membantu untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat. Hal ini tentunya sangat penting dalam menciptakan pemantapan ekonomi nasional yang lebih berkeadilan.

Berikutnya, *aspek ketiga* adalah pembangunan infrastruktur terutama untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Hal ini penting

karena ketersediaan infrastruktur adalah salah satu faktor utama yang menentukan daya saing suatu bangsa. Pembangunan infrastruktur yang dapat menghubungkan antara domestik dengan dunia luar merupakan salah satu daya tarik utama untuk menarik investor. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur bukan saja diarahkan untuk memperkuat konektivitas domestik tetapi juga memperkuat hubungan antara Indonesia dengan negara lain. Pengembangan infrastruktur di Indonesia Bagian Timur perlu untuk terus mendapat perhatian, karena berperan dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah Indonesia. Untuk itu, infrastruktur yang menghubungkan antara Kawasan Perhatian Investasi yang menjadi bagian utama dengan pusat ekonomi yang telah ditetapkan di dalam koridor menjadi prioritas utama sehingga mampu menurunkan biaya logistik yang sekarang ini masih sangat tinggi.

Pembangunan jalan diutamakan untuk membuka ketertutupan daerah yang berpotensi dan meningkatkan keterhubungan daerah perbatasan dengan Negara tetangga, dalam hal ini Koridor di Nusa Tenggara dan Papua.

Selain itu juga, untuk meningkatkan daya saing dan memperlancar hubungannya dengan koridor lain terutama koridor di Indonesia Bagian

Barat, peningkatan kapasitas angkut armada kapal perintis dan nasional untuk transportasi penumpang dan kargo telah menjadi salah satu *Big Win* untuk mendorong Sistem Logistik yang lebih kuat.

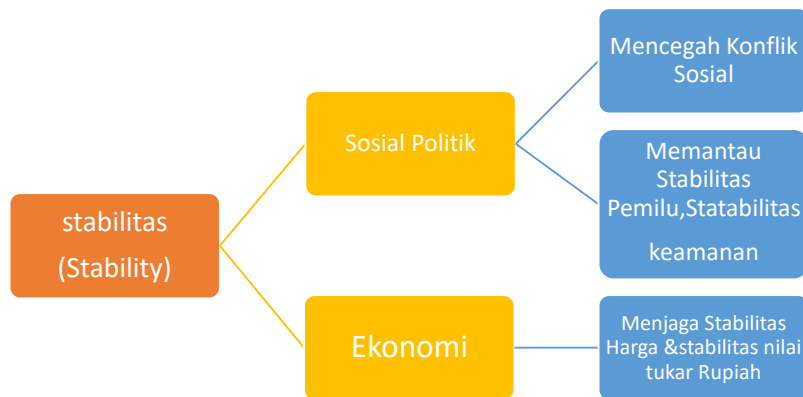
Stabilitas Ekonomi

Peningkatan stabilitas terdiri dari tiga aspek, yaitu: (i) stabilitas ekonomi; (ii) stabilitas sosial; dan (iii) stabilitas politik. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, maka faktor penting yang perlu dilakukan adalah menjaga stabilitas harga (terutama harga kebutuhan pokok) karena hal ini

sangat penting untuk menjaga inflasi pada tingkat yang rendah. Tekanan inflasi dapat berasal dari dua sisi, yaitu sisi permintaan dan sisi penawaran. Tekanan sisi permintaan biasanya terjadi jika ada kelebihan likuiditas ataupun dorongan permintaan masyarakat yang tiba-tiba meningkat.

Sementara itu, tekanan inflasi di sisi penawaran terjadi pada saat adanya kelangkaan produksi ataupun distribusi, yang biasanya disebabkan oleh masalah teknis di sumber produksi, bencana alam, faktor cuaca, kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi, serta aksi spekulasi.

Gambar 3 Kerangka Stabilitas Nasional



Tingkat inflasi juga dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah, yang mempengaruhi inflasi melalui jalur harga barang-barang impor. Sementara itu, kestabilan nilai tukar rupiah menjadi faktor penting bagi pengusaha dalam memutuskan untuk berinvestasi dan

mengembangkan usaha. Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Bappenas (2008) kepada 200 responden pelaku bisnis, dimana pelaku bisnis menilai stabilitas nilai tukar adalah lebih penting dibandingkan tingkat nilai tukar.

Kestabilan nilai tukar dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha dalam melakukan berbagai aktivitas ekonominya, baik konsumsi maupun investasi, sehingga perekonomian nasional dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, nilai tukar rupiah yang stabil akan meningkatkan kepastian dalam proses pembayaran kontrak bisnis (seperti ekspor dan impor) dan proses pengembangan usaha. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil serta nilai tukar yang tidak berfluktuasi, diperlukan adanya kerjasama dan komitmen dari seluruh pelaku ekonomi, baik pemerintah pusat dan daerah maupun swasta.

Stabilitas Sosial

Aspek berikutnya adalah *stabilitas sosial* yang merupakan faktor

penunjang stabilitas secara keseluruhan. Stabilitas sosial dapat diupayakan dengan pendekatan pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian dalam jangka panjang, yaitu dengan cara perencanaan sensitif konflik (*conflict sensitive planning*) atau Perencanaan Peka Perdamaian.

Melalui forum perencanaan pembangunan, masyarakat berkesempatan untuk bertemu dan berdiskusi sehingga bisa mengurangi

potensi konflik di antara masyarakat.

Stabilitas sosial dapat juga dilakukan dengan menjalankan mitigasi bencana yang tepat dan komprehensif, sehingga potensi ketidakstabilan sosial akibat bencana dapat dikurangi. Seperti telah diketahui bersama, Indonesia merupakan daerah rawan bencana dengan rata-rata kejadian bencana mencapai 1.100 kejadian setiap tahunnya berupa bencana geologi (gempa bumi, letusan gunung api, longsor) maupun bencana hidrometeorologi (banjir, angin puting beliung, cuaca ekstrim, abrasi, tsunami).

Guna meminimalkan risiko dan dampak bencana di masa mendatang, upaya peningkatan pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana diterapkan melalui: (i) perumusan strategi dan kebijakan program penanggulangan bencana, termasuk perencanaan dan penganggarannya; (ii) peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana terutama di kawasan rawan bencana tinggi; (iii) pengendalian pemanfaatan ruang yang memuat aspek pengurangan risiko bencana; dan (iv) peningkatan pemahaman masyarakat mengenai upaya-upaya pengurangan risiko dan mitigasi bencana melalui pendidikan dan pelatihan yang intensif dan berkesinambungan. Aspek ketiga

dalam kerangka stabilitas adalah *stabilitas politik*.

Situasi politik yang kondusif merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong pematapan perekonomian nasional dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan kata lain, stabilitas politik menjadi prasyarat utama dalam proses pemulihan ekonomi dan pembangunan ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pada era demokrasi, stabilitas politik dapat dibangun dengan penguatan kapasitas lembaga politik dan masyarakat sipil. Lembaga politik seperti partai politik harus melakukan fungsi-fungsi politiknya secara baik, dan masyarakat sipil harus mampu menuntut hak-hak mereka atas kesejahteraan dan keadilan. Amartya Sen menyebutkan bahwa pada sebuah demokrasi, para pejabat yang dipilih hanya bekerja baik untuk masyarakat apabila kepentingan mereka menjadi taruhannya. Oleh karena itu, demokrasi memerlukan masyarakat yang kuat agar ada jaminan bahwa kontrol masyarakat berjalan baik, mekanisme pergantian kekuasaan terjaga, dan pemimpin memelihara amanahnya.

Dalam menghadapi Pemilu 2019, stabilitas politik sangat tergantung antara lain pada kemampuan

lembaga penyelenggara pemilu untuk melakukan amanat konstitusi dan perundangan yang berlaku. Pada saat ini, isu strategis politik yang perlu mendapatkan perhatian semua pihak adalah suksesnya pemilu 2019, karena berkaitan dengan dua hal penting lain sebagai implikasinya. *Pertama*, untuk memastikan legitimasi dari pemerintah yang akan datang, sehingga mendapat dukungan penuh dari rakyat dalam memenuhi kepentingan mereka pada kesejahteraan ekonomi dan keadilan. *Kedua*, untuk mengurangi sebesar mungkin potensi konflik karena proses pemilu yang tidak memenuhi harapan masyarakat.

Pemilu yang jujur dan adil adalah syarat mutlak dalam menjaga proses berlanjutnya stabilitas politik dalam sistem demokrasi, tapi tentu tidak cukup hanya pemilu saja bagi proses pemerataan yang berkeadilan. Stabilitas dalam politik juga akan banyak ditentukan oleh besar kecilnya akses masyarakat pada proses pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan, menyangkut prioritas-prioritas pembangunan yang mendesak dilaksanakan. Kerangka kebijakan yang pro rakyat dalam jangka panjang merupakan faktor terpenting bagi peningkatan stabilitas politik. Oleh karena itu, terlihat nyata bahwa kesejahteraan dan keadilan itu mempunyai kaitan yang bersifat resiprokal sangat erat, baik proses

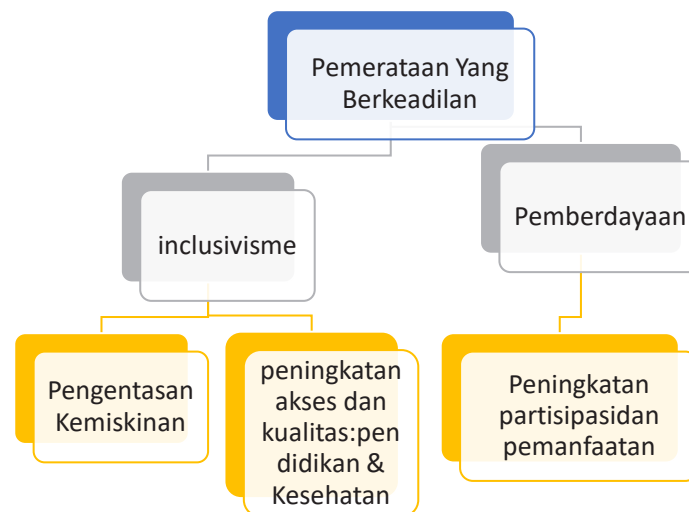
maupun substansi demokrasi. (Jeffrey Sachs).

Selanjutnya, dalam rangka untuk mendukung stabilitas politik, maka *stabilitas keamanan* dan ketertiban masyarakat di seluruh daerah merupakan hal yang sangat penting. Keamanan merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya aktivitas perekonomian dengan baik. Keamanan pun menjadi landasan penting dalam menciptakan ketahanan ekonomi nasional, agar perekonomian Indonesia mampu menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, maupun kelangsungan hidup bangsa dan Negara.

Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik perlu terus diarahkan dalam mewujudkan pemerataan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan (*inclusiveness*).

Salah satu upaya yang perlu untuk terus dilakukan oleh Pemerintah untuk mewujudkan pemerataan yang berkeadilan adalah dengan menerapkan strategi pertumbuhan yang berpihak pada penduduk miskin. Kebijakan afirmatif dan perluasan jangkauan manfaat menjadi kunci utama dalam mendorong proses pemerataan yang berkeadilan yaitu antara lain dengan memperluas baik cakupan target maupun manfaat program secara keseluruhan.

Gambar 4: Kerangka pemerataan yang berkeadilan



Namun demikian, pemerataan pembangunan harus memperhatikan keseimbangan antara penyediaan dan tuntutan kebutuhan pembangunan dan masyarakat. Terwujudnya

pemerataan yang berkeadilan dapat ditunjukkan oleh: (i) peningkatan akses masyarakat miskin dan non miskin terhadap pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya di wilayah perkotaan dan perdesaan; (ii) meningkatnya penciptaan lapangan kerja baik di sektor formal maupun informal untuk mendukung penurunan tingkat pengangguran; (iii) meningkatnya pemerataan pendapatan yang diindikasikan dengan menurunnya nilai *gini ratio*; serta (iv) tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Program pembangunan nasional sudah lebih banyak diarahkan dalam menanggulangi penduduk miskin melalui perencanaan pembangunan berpihak kepada rakyat miskin (*pro-poor*). Untuk itu, berbagai program telah dilaksanakan di hampir seluruh sektor pembangunan. Namun demikian, harus diupayakan sinergi dan sinkronisasi berbagai program secara lebih optimal. Di sisi lain penajaman target sasaran terus dilakukan antara lain dengan menyiapkan basis data terpadu (*unified database*). Dalam jangka panjang, program penanggulangan

kemiskinan akan lebih difokuskan pada pengembangan penghidupan yang berkelanjutan (*sustainable livelihood*). Hal ini akan sangat terkait dengan pemanfaatan secara optimal sumber daya lokal. Dalam upaya pengembangan penghidupan (*sustainable livelihood*), diperlukan adanya pemikiran lebih jauh mengenai perencanaan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh dimana partisipasi semua pihak sangat diperlukan.

Menjawab kebutuhan tersebut, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia telah disusun dengan tujuan untuk menjabarkan berbagai strategi, kebijakan dan program akseleratif/ percepatan dalam penanggulangan kemiskinan dengan pelaku yang sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta dan masyarakat (*public-people-private partnerships*). Sinergi pusat dan daerah serta partisipasi aktif daerah dalam menanggulangi kemiskinan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Peningkatan akses dan kualitas kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan ekonomi. Meningkatnya status kesehatan masyarakat akan membentuk sumber daya manusia yang sehat, produktif dan cerdas, yang merupakan komponen penting dalam memberikan

kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau dan terlindungi bagi penduduk Indonesia, dapat dicapai melalui upaya: (i) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); (ii) Peningkatan perbaikan gizi, (iii) Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, melalui penanggulangan faktor risiko penyakit, peningkatan pencegahan penyakit tidak menular, peningkatan layanan konseling, *testing* dan pengetahuan tentang penyakit (iv) Pelaksanaan jaminan kesehatan; dan (v) Peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan.

Sementara itu, pembangunan pendidikan memberi sumbangan signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Sampai saat ini, akses dan pemerataan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi sudah bisa ditingkatkan dengan baik.

Melalui pendidikan, tenaga kerja terdidik dapat mengembangkan visi dan wawasan yang lebih maju, menanamkan etos kerja tinggi, serta menumbuhkan sikap adaptif dan inovatif. Bahkan, tenaga kerja terdidik yang juga dibekali dengan penguasaan teknologi yang memadai akan dapat

menciptakan tenaga kerja yang berkeunggulan kompetitif (*competitive advantage*), karena dapat mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan masalah dalam artikel ini, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah :

1. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia telah disusun dengan tujuan untuk menjabarkan berbagai strategi, kebijakan dan program akseleratif/ percepatan dalam penanggulangan kemiskinan dengan pelaku yang sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta dan masyarakat (*public-people-private partnerships*). Sinergi pusat dan daerah serta partisipasi aktif daerah dalam menanggulangi kemiskinan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.
2. Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik perlu terus diarahkan dalam mewujudkan pemerataan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh

masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan (inclusiveness).

3. Program pembangunan nasional sudah lebih banyak diarahkan dalam menanggulangi penduduk miskin melalui perencanaan pembangunan berpihak kepada rakyat miskin (pro-poor). Untuk itu, berbagai program telah dilaksanakan di hampir seluruh sektor pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthur W. Lewis, 1986, 2009, *Growth and Fluctuations 1870 – 1914*, Routledge.
- Buku Pegangan, 2014. *Memantapkan Perekonomian Nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan*. Bappenas, Jakarta
- Djayanegara et. al 1986. *Mutu Model Manusia*. Raja Grafindo : Jakarta
- Emil Salim, 1986. *Pembangunan berwawasan Lingkungan*, LP3S. Jakarta
- Fredrich August Hayek. 2001. *Busines & Economics, Psychologi* Press. United States
- Ginjar Kartasasmita, 1996, *Pembangunan untuk rakyat*, cides. Jakarta
- James, William Iffe, 2006, *Community development Australia*,. Perason Education, Australia
- Jan Tinbergen. *Rencana Pembangunan*, Universitas Indonesia Press. Jakarta
- M. L. Jhingan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roslan karya Company.
- Max Weber, 1978. *Economy and Society*, Califor Mapress. United States
- Michael P. Todaro, 2008. *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga: Jakarta
- Mulyadi S, 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Raja Grafindo , Jakarta
- Mudrajat Kuncoro, 2011. *Perencanaan Daerah : Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan*, Salemba Empat,. Jakarta
- Philip J. Eldrige,. 2014. *Politics Of Human Nights In South East Asia, Politics In Asia*,. Routledge
- Richard Morris Titmuss, 1975, *Social Policy : an introduction*, Pantheon Books,. Jakarta: PT. New York City
- Ridwan HR, 2016. *Hukum Administrasi Negara Rajawali Perss*. Jakarta
- Riyadi dan Deddy S, Bratakusumah, 2005. *68 Perencanaan Pembangunan Daerah*. Bineka Lipta. Jakarta
- Sadono Sukirno, 2007. *Ekonomi Pembangunan Perenada Media*. Jakarta
- Undang-Undang, No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.
- [http://www.google.co.id/search=Perencanaan+Pembangunan+dalam Perspektif+](http://www.google.co.id/search=Perencanaan+Pembangunan+dalam+Perspektif+)

- lingkungan, diakses pada tanggal 14-nov-2017
- <http://medium.com/ceritapublik/sistem-perencanaan-pembangunan-diindonesia>,diakses pada tanggal 14-nov-2017
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/sistem-perencanaan-pembangunannasional>,diakses pada tanggal 16-Nov-2017
- <http://tirto.id/jokowi-bahas-tiga-program-pengentasan-kemeskina-ctqt>,diakses pada tanggal 17-nov-2017
- <http://www.bappenas.go.id/data-dan-informasi-utama/publikasi/>
- <http://tirto.id/ekspor-dan-impor-indonesia>, diakses pada tanggal 18-juni-2017.
- <http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/0/38651>,diakses pada tanggal 5-April-2019.